

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1. Latar Belakang Penelitian

Pembangunan kepariwisataan sebagai salah satu sektor andalan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendapatan daerah, pemberdayaan perekonomian masyarakat, memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha, serta meningkatkan pengenalan dan pemasaran produk dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pariwisata memperlihatkan perkembangan yang stabil dan luput dari fluktuasi ekstrim sebagaimana dialami sektor industri lain. Potensi perkembangan yang diprediksi semakin baik di masa-masa mendatang, pariwisata diyakini akan terus berkontribusi dalam kehidupan masyarakat dari berbagai aspek (RPJMN 2010-2014).

Pembangunan sektor pariwisata merupakan bagian integral dalam pembangunan Indonesia. Pembangunan memberikan dampak yang positif bagi pertumbuhan perekonomian suatu daerah pada khususnya dan perekonomian nasional pada umumnya. Partisipasi Pemerintah Daerah dalam pembangunan kebudayaan dan pariwisata mendorong upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan peradaban dan persatuan bangsa, serta meningkatkan persahabatan antar negara. Oleh karena itu upaya Pemerintah Daerah dalam mengembangkan sektor pariwisata merupakan salah satu langkah yang sangat tepat khususnya dalam memacu pertumbuhan perekonomian di daerah. Namun perlu diingat bahwa dalam mengembangkan sektor pariwisata adalah bagaimana agar usaha pengembangan tersebut tidak mengganggu bagi kelestarian alam dan menggunakan suatu pendekatan sistem sebagaimana yang dijelaskan mengenai bidang sosial dan budaya yang mencakup kebudayaan, kesenian dan pariwisata yaitu:

1. Menjadikan kesenian dan kebudayaan tradisional Indonesia sebagai wahana bagi perkembangan pariwisata nasional dan mempromosikan keluar negeri secara konsisten sehingga dapat menjadi persahabatan antar bangsa.
2. Mengembangkan pariwisata melalui pendekatan sistem yang utuh dan terpadu bersifat interdisipliner dan partisipatoris dengan menggunakan kriteria ekonomis, sosial budaya, hemat energi, melestarikan alam tidak merusak lingkungan (dalam Nugroho, 2011).

Hal ini sesuai dengan apa yang terkandung dalam tujuan pengembangan kepariwisataan yang dinyatakan dalam Undang-Undang No 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan, objek dan daya tarik wisata yang meliputi keadaan alam, flora, fauna, serta peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, seni dan budaya yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan sumber daya dan modal pembangunan kepariwisataan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, aktivitas pariwisata juga merupakan usaha pemanfaatan berbagai bentuk sumber daya lingkungan, baik yang bersifat biotis maupun budaya.

Selain aspek ekonomi, dalam aspek sosial pariwisata menyumbang dalam memberikan lapangan kerja bagi masyarakat di daerah tujuan wisata. Peranan pariwisata yang menyangkut berbagai aspek kehidupan, dalam hal ini pariwisata sudah hampir menyentuh semua masyarakat dunia termasuk Indonesia, sampai kepada masyarakat yang dulu dikenal sebagai masyarakat terpencilpun kini sudah dirambah pariwisata. Pariwisata telah terbukti menjadi salah satu *prime mover* dalam perubahan sosial budaya (Pitana & Gayatri, 2005). WTO melukiskan bahwa satu dari delapan pekerja di dunia ini kehidupannya tergantung–langsung atau tidak langsung- dari pariwisata (Pitana & Gayatri, 2005). Tahun 1995 pariwisata mampu menciptakan kesempatan kerja secara langsung untuk 211 juta orang. Pada tahun 2001, pariwisata menciptakan

kesempatan kerja bagi 207 juta orang, atau lebih dari 8% kesempatan kerja di seluruh dunia (UNEP, 2002).

Dalam periode 2005 hingga 2008, jumlah kunjungan Wisatawan Mancanegara meningkat dari 5,0 juta menjadi 6,4 juta, atau meningkat sebesar 28,0 persen; diikuti dengan peningkatan devisa dari USD 4,52 miliar menjadi USD 7,37 miliar, atau meningkat sebesar 63,05 persen. Jumlah Wisatawan Nusantara (winus) meningkat dari 198,4 juta menjadi 225,0 juta atau meningkat sebesar 13,41 persen; serta pengeluaran wisnus meningkat dari Rp 74,72 triliun menjadi Rp 123,17 atau meningkat sebesar 64,84 persen (data dari RPJMN 2009-2014 dalam Nugroho, 2011:220). Secara umum pariwisata telah menciptakan satu dari 15 lapangan kerja di seluruh dunia. Dengan demikian tidak heran jika mesin penggerak dalam penciptaan tenaga kerja pada abad 21 ini adalah pariwisata (Menurut David J. De Villers, 1999, Salah Wahab, 1999 dalam Pitana & Gayatri, 2005).

Tidak terkecuali itu, di Indonesia secara nasional pariwisata juga mengalami perkembangan yang positif. Peranan pariwisata begitu terasa terutama setelah melemahnya peranan minyak dan gas meskipun nilai nominalnya dalam dollar sedikit mengalami fluktuasi (Pitana & Gayatri, 2005). Meskipun bersifat fluktuatif, pariwisata di Indonesia dianggap sebagai salah satu sektor ekonomi penting dan diharapkan dapat menjadi penghasil devisa nomor satu. Hal tersebut tidak lain karena aspek ekonomi pariwisata tidak hanya berhubungan dengan kegiatan ekonomi yang langsung berkaitan dengan kegiatan pariwisata, seperti usaha perhotelan, restoran dan penyelenggaraan paket wisata. Banyak kegiatan ekonomi lainnya yang berhubungan erat dengan pariwisata seperti transportasi, telekomunikasi dan bisnis eceran (Suwanto, 2004).

Secara ekonomi pariwisata menyumbang besar terhadap devisa Indonesia. Pendapatan devisa Indonesia dari pariwisata selama rentang 2004-2011 bersifat fluktuatif bersamaan dengan

berfluktuasinya jumlah wisatawan yang berkunjung. Jumlah wisatawan yang berkunjung ke Indonesia periode 2004-2011 menunjukkan angka yang positif dengan rata-rata pertumbuhan 182.115 orang/ tahun (3,83%). Dari rentang waktu tersebut, periode 2007-2011 adalah periode dimana jumlah kunjungan wisatawan mengalami peningkatan yang sangat positif dengan jumlah kunjungan mencapai 778.838 orang/tahun (14,89%).

Menteri Pariwisata (Menpar) Arief Yahya mengatakan, tren pertumbuhan pariwisata semakin baik, meskipun pada empat (4) bulan pertama (Januari-April) 2015 sedikit melamban di bawah 4 %, namun kondisi itu diharapkan bersifat sementara (*seasonal*) karena bertepatan *low season*. “Melihat tren kita optimis target 12 juta wisatawan mancanegara (wisman) pada akhir tahun ini akan tercapai,” kata Arief Yahya. (Pikiran rakyat, 2 Juni 2015)

Dari jumlah kunjungan tersebut rata-rata penerimaan devisa mengalami peningkatan sejumlah USD 283,01/tahun (6,18%). Sebagaimana jumlah kunjungan, penerimaan devisa Indonesia pariwisata periode 2007-2011 adalah periode penerimaan dengan peningkatan yang positif bersamaan dengan kenaikan jumlah wisatawan yang juga positif. Penerimaan devisa selama 2007-2011 mencapai rata- rata USD 1.469,705/tahun (23,85%).

Untuk lebih rinci, jumlah kunjungan dan jumlah penerimaan devisa Indonesia dari sektor pariwisata selama periode 2007-2011 dapat dilihat dalam tabel 1.1:

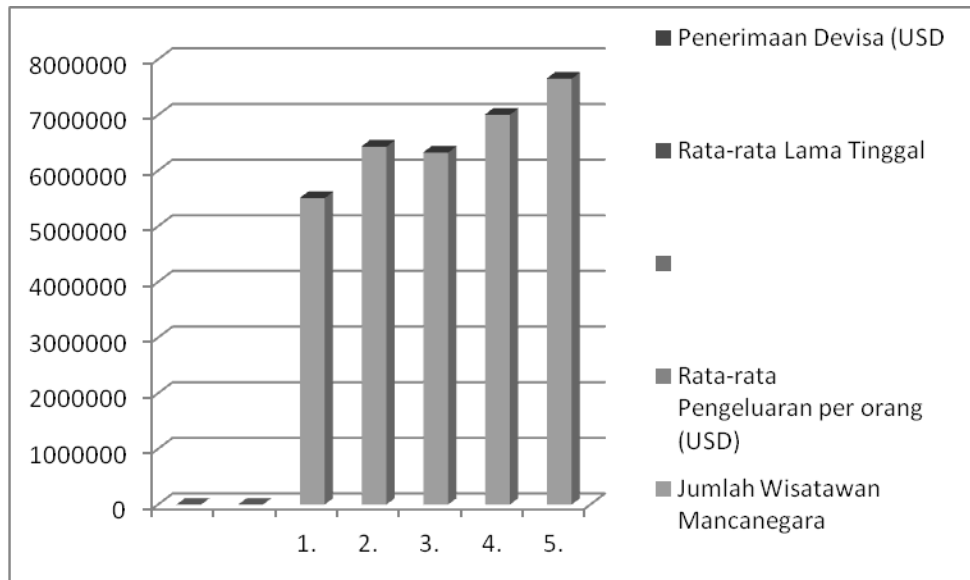
Tabel 1.1

Statistik Kunjungan dan Penerimaan Devisa Wisatawan di Indonesia 2007-2011

No	Tahun	Jumlah Wisatawan Mancanegara	Rata-rata Pengeluaran per orang (USD)		Rata- rata Lama Tinggal	Penerimaan Devisa (USD)
			Per Kunjungan	Per Hari		
1.	2007	5.505.759	970.98	107,7	9,02	5.345,98

2.	2008	6.429.027	1.178,54	137,38	8,58	7.377,39
3.	2009	6.323.730	995,93	129,57	7,69	6.297,99
4.	2010	7.002.944	1.085,75	135,01	8,04	7.603,45
5.	2011	7.649.731	1.245,87	146,72	9,05	8.011,46

Sumber : Badan Pusat Statistik 2013



Gambar 1.1 Statistik Kunjungan dan Penerimaan Devisa Wisatawan di Indonesia 2007-2011

Indonesia sebagai negara Kepulauan terbesar di dunia memiliki potensi sumber daya pesisir yang besar sebagai modal dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, termasuk masyarakat pesisir. Modal tersebut dapat dimanfaatkan melalui pembangunan kepariwisataan di wilayah pesisir, sebagaimana tujuan kepariwisataan. Masyarakat pesisir sebagai pelaku dan tujuan pembangunan wilayah pesisir dan kelautan harus mendapatkan manfaat terbesar dari kegiatan pembangunan tersebut. Demikian pula dalam pembangunan wilayah pesisir untuk kegiatan pariwisata harus dilakukan dengan mengedepankan upaya difersifikasi usaha dan memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat pesisir. Pengembangan wisata bahari memiliki arti strategis dalam pengembangan budaya bahari memiliki arti strategis dalam pengembangan wisata bahari, usaha multisektor, ekonomi daerah serta penguatan peran serta masyarakat.

Pengelolaan wisata bahari secara terpadu, perencanaan investigasi yang menjanjikan, pemanfaatan tata ruang yang baik serta berpihak kepada masyarakat dapat meningkatkan kualitas hidup manusia yang tergantung pada sumberdaya laut. Pengembangan kawasan wisata bahari secara berkelanjutan hendaknya menerapkan konsep ekowisata yaitu suatu konsep pariwisata yang mencerminkan wawasan lingkungan dan mengikuti kaidah-kaidah keseimbangan dan kelestarian dan dapat meningkatkan kualitas hubungan antar manusia, kualitas hidup masyarakat setempat dan menjaga kualitas lingkungan. Disamping itu alam lingkungan terjaga kelestariannya. Ekowisata biasanya mempunyai sifat yang agak khusus dengan lokasi yang luasnya relatif terbatas, sehingga perlu diingat daya dukung lingkungan untuk pemanfaatannya. Daya dukung artian pengaturan jumlah pengunjung dan penentuan lokasi untuk setiap jenis kegiatan yang sesuai. Tetapi disamping memberikan manfaat yang cukup besar, sektor pariwisata juga memungkinkan akibat negatif yang perlu dihindari, seperti distorsi terhadap masyarakat lokal, degradasi lingkungan, hilangnya identitas dan integritas Bangsa (dalam Nugroho, 2011: 15-19).

Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan satu-satunya wilayah Kabupaten di Sumatera Barat yang merupakan wilayah kepulauan. Secara geogarafis letaknya terpisah dari Kabupaten lainnya di Sumatera Barat karena di batasi oleh laut. Terletak di bagian Barat Sumatera Barat di perairan Samudera *Hindia*, merupakan gugusan kepulauan yang memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata khususnya wisata bahari, sebagai dikawasan pesisir yang dikelilingi laut, pulau-pulau kecil, pesona hutan yang masih alami dan tradisi budaya yang spesifik, secara pembentukan merupakan jenis pulau tektonik. Peran wilayah pesisir dan laut sudah menjadi bagian penting dari kegiatan pembangunan perekonomian di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Sejak tahun 1998 pemerintah Indonesia mempromosikan Kepulauan ini

sebagai *Indonesian Marine Tourism Destination* (dalam Oram, 1999). Perairan Kepulauan Mentawai ini memiliki ombak yang membentuk gua dan pantai yang indah, menjadi salah satu destinasi surfing dunia yang menarik Wisatawan Mancanegara (dalam Oram,1999).

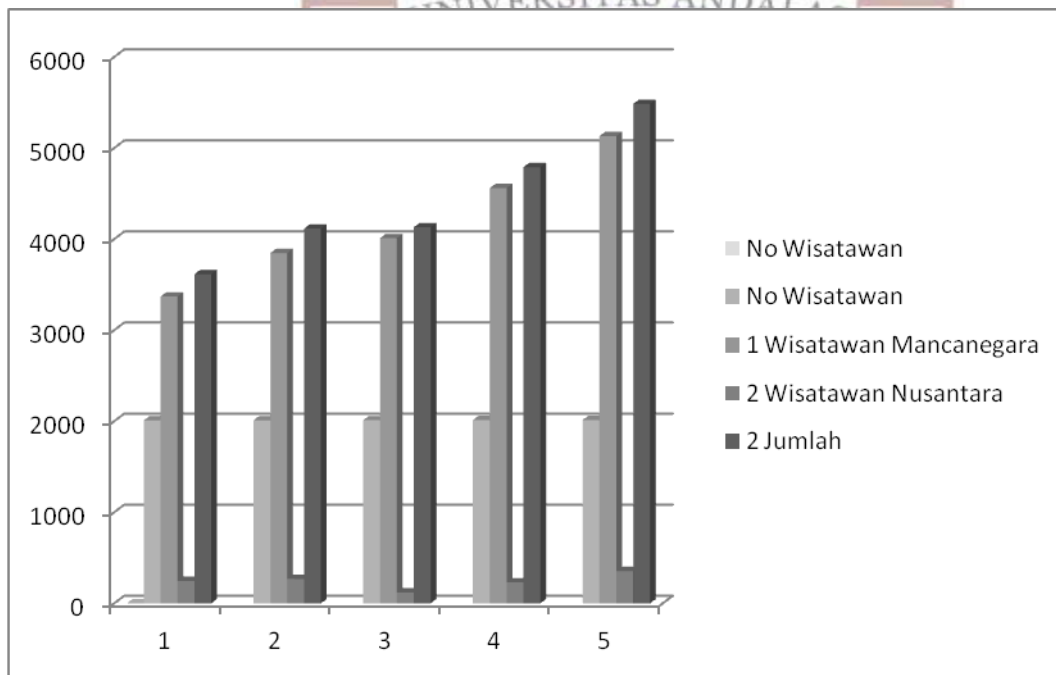
Tuapeijat sebagai Ibu Kabupaten Kepulauan Mentawai, yang merupakan pintu gerbang masuk ke kepulauan ini. Dalam Rencana Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPDA), Tuapeijat masuk kawasan pengembangan wisata khususnya wisata bahari dan wisata budaya sebagai salah satu prioritas pengembangan daerah. Sejalan dengan Visi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Mentawai, yaitu: “Mewujudkan Mentawai Sebagai Destinasi Utama Wisata Eksklusif”, maksudnya menjadi daerah tujuan pariwisata utama dan menjadikan seluruh objek wisata eksklusif, tertata, terkelola sehingga bernilai tinggi.

Pemerintah Kabupaten Mentawai telah memfokuskan perhatiannya untuk mengembangkan sektor pariwisata bahari karena termasuk sektor unggulan dalam perencanaan pembangunan. Saat ini beberapa daerah di Kabupaten Kepulauan Mentawai sudah dikembangkan dan dimanfaatkan untuk lokasi wisata bahari karena memiliki pantai dan ombak yang cukup bagus untuk wisata *surfing*. Salah satu kecamatan yang berpotensi untuk pengembangan wisata bahari adalah Kecamatan Sipora yang memiliki 5 (lima) objek wisata bahari yang sangat berpotensi untuk dikembangkan. Kecamatan Sipora telah ditetapkan dalam RIPPDA Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2011 sebagai salah satu destinasi wisata dan direncanakan untuk menjadi wisata bahari.

**Tabel 1.2 Jumlah Kunjungan Wisatawan ke Kab.
Kep. Mentawai**

No	Wisatawan	Jumlah kunjungan (orang)				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	Wisatawan asing	3.369	3.847	4.010	4.560	5.130
2	Wisatawan lokal	245	268	120	230	354
	Jumlah	3.614	4.115	4.130	4.790	5.484

Sumber : Bidang Pariwisata Disbudparpora Kab. Mentawai Tahun 2014



Gambar 1.2. Jumlah Kunjungan Wisatawan ke Kab. Kep. Mentawai

Adapun sarana, prasarana pendukung dan sumber daya manusia pada umumnya masih sangat minim. Perhatian berbagai stakeholder terhadap pengembangan kawasan objek wisata bahari masih kurang, sehingga kegiatan pengelolaan kawasan objek wisata bahari belum terlihat dan belum tergali secara maksimal, serta peningkatan pendayagunaan potensi pesisir dan laut secara optimal masih menghadapi masalah serius dan kontribusinya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat cenderung belum dirasa. Masyarakat dan Pemerintah Daerah belum

mengembangkan secara maksimal potensi objek pariwisata pantai dan pariwisata bahari. Hal ini disebabkan belum tersedianya infrastruktur dasar yang memadai dan sarana prasarana pariwisata lainnya. Dalam hal ini juga belum dilakukannya promosi terhadap pariwisata di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Jumlah armada transportasi dari Padang ke wilayah Mentawai sangat terbatas, baik armada kapal laut maupun udara. Jumlah armada transportasi yang terbatas sangat menghambat dalam pengembangan pariwisata ke Mentawai. Jadwal pelayaran dan penerbangan yang sangat terkait dengan kondisi cuaca ditambah dengan keterbatasan armada membuat ketidakpastian para wisatawan untuk menentukan jadwal wisata mereka. Pesawat yang melayani penerbangan masih merupakan pesawat kecil bukan pesawat menengah. Sedangkan cuaca di Mentawai sering berubah dalam waktu yang tidak mudah diprediksi, sehingga jadwal penerbangan tak menentu.

Jalan di daratan Kepulauan Mentawai sangat terbatas, sehingga alat penghubung antar wilayah dalam satu pulau menggunakan alat transportasi laut yang penuh dengan resiko. Hal ini disebabkan oleh ombak di wilayah Kepulauan Mentawai sering mengalami perubahan mendadak serta ombak dan arusnya besar mengingat wilayah tersebut berbatasan langsung dengan Samudera *Hindia*. Jalan antar daerah dalam satu pulau (menuju ke pedalaman) masih didominasi oleh perahu. Hal ini berdampak pada waktu tempuh yang relatif panjang walaupun jarak yang ditempuhnya pendek.

Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai belum memprioritaskan pembangunan di wilayah tertinggal karena dianggap tidak menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara langsung. Koordinasi antara Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) untuk mengupayakan pengembangan pariwisata di Kabupaten Kepulauan Mentawai masih lemah, hal ini menyebabkan kegiatan yang dibangun jarang bersinergi bahkan tidak jarang muncul

egosektoral. Dukungan antar sektor terkait untuk mengembangkan khususnya sektor pariwisata belum optimal.

Sistem informasi belum memberikan pelayanan yang maksimal. Telekomunikasi sangat terbatas, yang membuat belum berkembangnya sistem informasi yang dapat memberikan akses pada informasi produk unggulan, pasar, dan teknologi. Keterbatasan pengetahuan dan kemampuan dalam penggunaan teknologi ini menjadi salah satu kendala dan pemicu adanya eksploitasi sumberdaya yang merusak potensi lestari dan berdampak negatif bagi lingkungan. Alat komunikasi sudah merupakan bagian inti (*inherent*) dalam produk pariwisata, sehingga keterbatasan alat komunikasi jelas menghambat proses pengembangan pariwisata di Mentawai. Mengingat Pariwisata di Mentawai terpusat pada daerah laut dan hutan alam, maka para wisatawan menghadapi banyak tantangan alam. Untuk dapat menyelamatkan mereka yang mengalami masalah dengan alam perlu alat komunikasi yang canggih. Keterbatasan alat komunikasi di Mentawai sangat mengganggu pengembangan pariwisata di wilayah tersebut.

Tidak ada armada *rescue*, baik yang berupa tenaga manusia maupun peralatannya yang memadai untuk mengatasi kejadian kecelakaan di kegiatan selancar maupun wisata alam hutan serta budaya di wilayah terpencil. Keamanan wisatawan sudah merupakan bagian penting dan menyatu dalam layanan pariwisata.

Lemahnya kepemilikan properti (*property right*). Hal ini disebabkan oleh faktor budaya (adat) yang terkait dengan kepemilikan lahan dan aturan daerah tentang kepemilikan lahan belum dapat menjembatani perbedaan antara budaya setempat dan penanam modal. Masalah pemilikan atau masalah ulayat dan adat merupakan tantangan bagi Pemerintah Daerah, karena sebagai modal dalam pembangunan yang tentunya melibatkan masyarakat Kabupaten kepulauan Mentawai sendiri, sebagai pemilik hak ulayat dan adat yang bisa ikut berperan dalam proses

pembangunan, khususnya pada sektor pariwisata. Budaya dan adat istiadat akan menunjukkan pada proporsi sebenarnya dan dengan bersama-sama Pemerintah dan stakeholder lainnya akan membangun pariwisata Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagai wilayah yang menjanjikan pada masa akan datang.

Pemerintah Daerah belum optimal dalam mengupayakan potensi wisata bahari yang sangat besar, dalam hal ini belum adanya sebuah regulasi. Selain sebagai jaminan juga akan menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam mengeluarkan berbagai kebijakan dalam perencanaan pembangunan daerah sektor kepariwisataan khususnya terhadap pengembangan dan pengelolaan zona wisata bahari.

Menurut data Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2013 terdapat sebanyak 194 objek wisata yang berada di sepuluh Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Mentawai yang berpotensi untuk dikembangkan antara lain; 22 objek wisata panorama alam, 150 objek wisata bahari, 9 objek wisata sumber air, dan 13 objek wisata budaya. Jenis objek wisata bahari umumnya lebih mendominasi, oleh karena itu salah satu subsektor pariwisata yang mendapatkan perhatian serius dan pengelolaan yang baik adalah wisata bahari, yang sangat berpotensi serius untuk dikembangkan demi kemajuan daerah Mentawai. Selama ini, wisata di segmen inilah yang paling diminati wisatawan mancanegara. Kegiatan yang sangat bisa dilakukan antara lain wisata pantai, selancar (*surfing dan boatsurfing*), menyelam (*diving/snorkling*) berlayar (*sailing*), pesiar (*cruising*), berenang (*swimming*), dan memancing (*fishing*).

Dari data statistik Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga terdapat 5 (lima) objek wisata yang berpotensi dan menjadi prioritas pengembangan objek wisata di Kecamatan Sipora seperti terlihat pada tabel berikut.

Tabel 1.3

Banyaknya Resort, Wisma dan Penginapan di Kepulauan Mentawai, 2013

No.	Tahun	Resort	Wisma	Penginapan
1.	2013	24	9	24
2.	2012	13	12	32
3.	2011	18	6	23
4.	2010	10	0	21
5.	2009	10	0	21

Sumber : BPS Kabupaten Kepulauan Mentawai 2014

Sementara fasilitas atau sarana pendukung untuk pengembangan wisata bahari di Kecamatan Sipora Utara pada umumnya masih sangat minim dan belum memadai, seperti resort, penginapan dan tempat-tempat kuliner yang ada masih sangat terbatas, dan itupun merupakan milik swasta dan masyarakat setempat, bahkan pengelola resort berasal dari negara asing (Australia dan Italia) yang bekerjasama dengan penduduk lokal yang memiliki lahan untuk kawasan resort dengan menggunakan sistem kontrak. Sarana transportasi yang akan mengangkut wisatawan pun masih kurang, hanya mengandalkan kapal barang atau kapal penumpang (kapal kayu) yang disubsidi Pemda Mentawai yang jumlahnya masih sangat sedikit, sehingga untuk ke lokasi wisata kita harus menggunakan *speedboat* dan membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang cukup besar. Koordinasi antar SKPD yang terkait dalam upaya pengembangan wisata bahari masih sangat lemah.

Minimnya sarana dan prasarana transportasi yang dimiliki tidak membuat kunjungan para wisatawan mancanegara semakin sedikit sebaliknya mengalami peningkatan tiap tahunnya untuk datang berkunjung ke Kabupaten Kepulauan Mentawai. Kunjungan para wisatawan mancanegara dapat diartikan sebagai kunjungan wisata untuk menikmati alam, hal ini akan menjadi potensi pemasukan bagi daerah secara umum. Berbagai bentuk kunjungan wisata yang dilakukan oleh para wisatawan pada dasarnya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pariwisata. Setiap pengunjung yang datang berkunjung pada dasarnya memerlukan akomodasi, transportasi, konsumsi, dan kebutuhan lain.

Motivasi merupakan hal yang mendasar dalam melakukan setiap aktifitas, termasuk dalam wisatawan dan pariwisata, karena motivasi merupakan *trigger* dari proses perjalanan wisata, walaupun motivasi sering tidak disadari oleh wisatawan itu sendiri (Sharpley, dalam Wahab, 1997). Analisis mengenai motivasi semakin penting kalau dikaitkan dengan pariwisata sebagai fenomena masyarakat modren, akan tetapi tidak ada kepastian bahwa hal-hal yang dapat diduga dapat menjadi motif wisata atau terungkap dalam penelitian-penelitian motivasi wisata (*motivation research*) tersebut telah meliputi semua kemungkinan motif perjalanan wisata. Pada hakikatnya motif orang untuk mengadakan motif wisata tersebut tidak terbatas dan tidak dapat dibatasi. Prilaku masyarakat modren dalam melakukan perjalanan wisata kadang dipengaruhi oleh berbagai motivasi yang sangat kompleks, kadang bukan hanya untuk *survival* sebagaimana motivasi perjalanan masyarakat sederhana.

Selain itu motivasi juga merupakan faktor penting bagi calon wisatawan mancanegara yang akan melakukan atau mengambil keputusan mengenai daerah tujuan wisata yang akan dikunjunginya. Calon wisatawan akan mempersepsi daerah yang menjadi tujuan wisata yang memungkinkan, di mana persepsi ini dihasilkan oleh preferensi individual, pengalaman

sebelumnya, dan informasi yang didapatkannya. Motivasi perjalanan wisata telah mengalami perubahan, sejalan dengan perkembangan pariwisata itu sendiri.

1.2. Rumusan Masalah dan Pertanyaan Penelitian

Objek pariwisata yang dimiliki Kabupaten Kepulauan Mentawai telah dikenal baik oleh masyarakat mancanegara maupun masyarakat daerah sendiri, ini tentunya dapat dimanfaatkan sebagai potensi sumber pendapatan daerah apabila keberadaannya dikelola dengan baik, paling tidak untuk menarik minat wisatawan domestik. Untuk mengembangkan obyek wisata bahari di Kabupaten Kepulauan Mentawai tentunya tidak mudah karena sarana, prasarana pendukung dan sumber daya manusia pada umumnya masih adanya hambatan sangat minim, jumlah armada transportasi laut dan udara dari Padang ke wilayah Mentawai sangat terbatas, Pemerintah Daerah belum memprioritaskan pembangunan di wilayah tertinggal secara optimal, telekomunikasi sangat terbatas, tidak adanya armada *rescue* serta lemahnya kepemilikan properti (*properti right*), hal inilah yang menjadi kendala dan hambatan yang dapat mempengaruhi upaya pengembangan dan pengelolaan secara optimal terhadap objek wisata bahari yang ada di Kabupaten Kepulauan Mentawai, maka dari itu peran serta dari pihak swasta juga sangat diperlukan untuk membantu kemajuan pariwisata di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Sektor pariwisata bahari Kepulauan Mentawai mempunyai kedudukan cukup strategis dalam pembangunan nasional pada khususnya Kabupaten Kepulauan Mentawai. Kondisi ini dikarenakan adanya objek wisata yang potensial seperti wisata bahari dan wisata budaya, untuk itu diupayakan pengembangan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Pariwisata mengalami perkembangan karena adanya gerakan manusia dalam mencari sesuatu yang belum diketahuinya, menjelajah wilayah baru, mencari perubahan suasana, atau untuk mendapatkan pengalaman baru. Motivasi wisatawan mengalami pergeseran, walaupun

tidak ada kepastian untuk dapat mengetahui semua jenis motif wisata tersebut, dari memandangi motivasi sebagai proses singkat untuk melihat perilaku perjalanan wisata, ke arah yang lebih menekankan bagaimana motivasi mempengaruhi kebutuhan psikologis dan rencana jangka panjang seseorang, dengan melihat motif intrinsik (seperti *self actualisation*) sebagai komponen yang sangat penting.

Perkembangan pariwisata telah lama menjadi perhatian dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi politik, administrasi, kenegaraan, maupun sosiologi, walaupun belum ada kesepakatan secara akademis mengenai apa itu wisatawan dan pariwisata. Kata wisata (*tour*) secara harfiah dalam kamus berarti “perjalanan di mana si pelaku kembali ke tempat awalnya, perjalanan sekuler yang dilakukan untuk tujuan bisnis, bersenang-senang, atau pendidikan, pada mana berbagai tempat dikunjungi dan biasanya menggunakan jadwal perjalanan yang terencana”. (Murphy, dalam Pitana 2005: 4-5). Batasan ini mempunyai ruang yang sangat luas, karena berbagai motivasi termasuk ke dalamnya, sehingga sulit melakukan pengukuran.

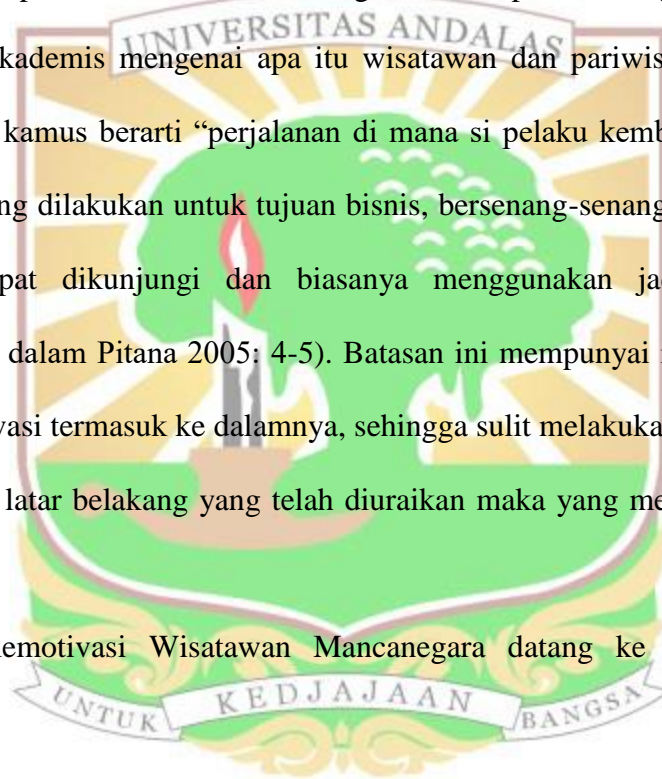
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka yang menjadi rumusan masalah adalah

Apa yang memotivasi Wisatawan Mancanegara datang ke Kabupaten Kepulauan Mentawai ?

1.3 . Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengidentifikasi latarbelakang sosial ekonomi Wisatawan Mancanegara (pekerjaan, pendidikan dan asal negara) yang berkunjung di Kecamatan Sipora Kabupaten Kepulauan Mentawai.



2. Mengetahui motif para wisatawan mancanegara berkunjung ke Kabupaten Kepulauan Mentawai.

1.4. Manfaat Penelitian

Diharapkan, informasi yang diperoleh dari penelitian ini dapat bermanfaat baik secara akademis maupun praktis.

1. Akademis, melalui penelitian ini, diharapkan digunakan sebagai referensi guna penelitian lebih lanjut tentang strategi pengembangan pariwisata secara umum dan wisata bahari secara khusus.
2. Praktis, penelitian ini diharapkan untuk:
 - a. Memberikan informasi tentang potensi wisata bahari yang ada di Kecamatan Sipora Utara dapat dikembangkan sebagai produk unggulan daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah.
 - b. Memberikan informasi dan masukan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai serta Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda Olahraga Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam upaya perumusan prioritas kebijakan dan strategi pengembangan, serta peningkatan pelestarian lingkungan alam sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih optimal terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

